

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
KODE MK	:	3PBIP322
SEMESTER	:	5

Tim Penyusun:

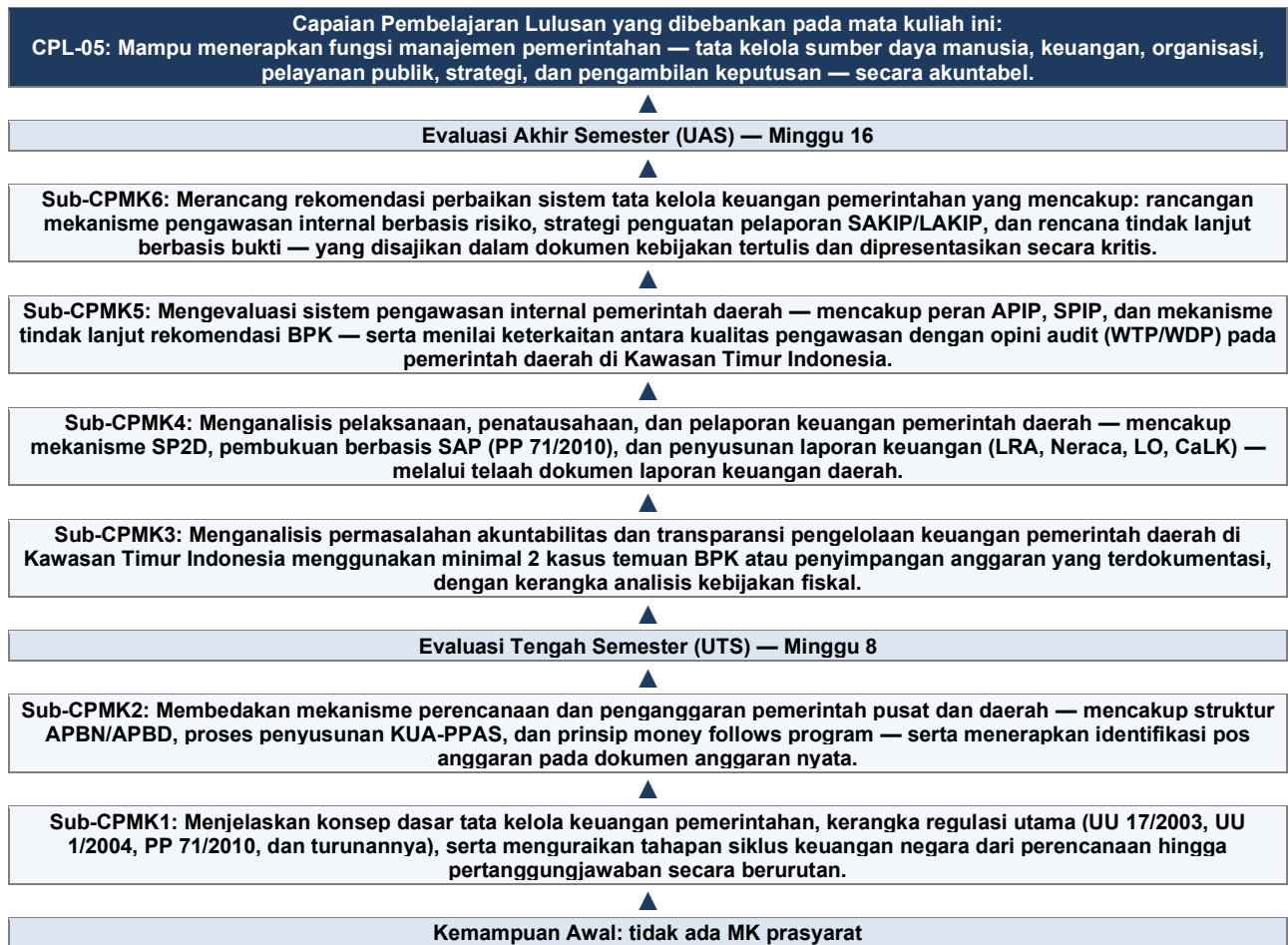
Hasan Bau, S.E., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

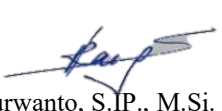
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3PBIP322
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		Tgl Penyusunan
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan		3PBIP322	MKWP	T=3	P=0	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	
		 Hasan Bau, S.E., M.Si. NIDN. 0911038704	 Hasan Bau, S.E., M.Si. NIDN. 0911038704		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, kerangka regulasi, dan siklus tata kelola keuangan pemerintahan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah — termasuk kasus penyimpangan anggaran dan temuan BPK — menggunakan pendekatan analisis kebijakan fiskal berbasis studi kasus di Kawasan Timur Indonesia.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif — mencakup rancangan mekanisme pengawasan internal, strategi penguatan laporan keuangan berbasis SAKIP/LAKIP, serta rencana tindak lanjut berbasis bukti — yang disajikan dalam bentuk dokumen kebijakan tertulis dan dipresentasikan secara kritis.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar tata kelola keuangan pemerintahan, kerangka regulasi utama (UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010, dan turunannya), serta menguraikan tahapan siklus keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban secara berurutan.				

	Sub-CPMK2	Membedakan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah — mencakup struktur APBN/APBD, proses penyusunan KUA-PPAS, dan prinsip money follows program — serta menerapkan identifikasi pos anggaran pada dokumen anggaran nyata.																																		
	Sub-CPMK3	Menganalisis permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan minimal 2 kasus temuan BPK atau penyimpangan anggaran yang terdokumentasi, dengan kerangka analisis kebijakan fiskal.																																		
	Sub-CPMK4	Menganalisis pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah — mencakup mekanisme SP2D, pembukuan berbasis SAP (PP 71/2010), dan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, CaLK) — melalui telaah dokumen laporan keuangan daerah.																																		
	Sub-CPMK5	Mengevaluasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah — mencakup peran APIP, SPIP, dan mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK — serta menilai keterkaitan antara kualitas pengawasan dengan opini audit (WTP/WDP) pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia.																																		
	Sub-CPMK6	Merancang rekomendasi perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang mencakup: rancangan mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut berbasis bukti — yang disajikan dalam dokumen kebijakan tertulis dan dipresentasikan secara kritis.																																		
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																																			
	<table><tr><td></td><td>CPMK1</td><td>CPMK2</td><td>CPMK3</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>					CPMK1	CPMK2	CPMK3	Sub-CPMK1	√	—	—	Sub-CPMK2	√	—	—	Sub-CPMK3	—	√	—	Sub-CPMK4	√	—	—	Sub-CPMK5	—	√	—	Sub-CPMK6	—	—	√	Jumlah	3	2	1
	CPMK1	CPMK2	CPMK3																																	
Sub-CPMK1	√	—	—																																	
Sub-CPMK2	√	—	—																																	
Sub-CPMK3	—	√	—																																	
Sub-CPMK4	√	—	—																																	
Sub-CPMK5	—	√	—																																	
Sub-CPMK6	—	—	√																																	
Jumlah	3	2	1																																	
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																				
	<table><tr><td></td><td>CPL-05 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>14</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>22</td><td>22</td><td>3</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>14</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>22</td><td>22</td><td>3</td></tr></table>					CPL-05 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	14	14	2	Sub-CPMK2	22	22	3	Sub-CPMK3	14	14	2	Sub-CPMK4	22	22	3												
	CPL-05 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																	
Sub-CPMK1	14	14	2																																	
Sub-CPMK2	22	22	3																																	
Sub-CPMK3	14	14	2																																	
Sub-CPMK4	22	22	3																																	

	<table><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>14</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>14</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>100</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>	Sub-CPMK5	14	14	2	Sub-CPMK6	14	14	2		100	100	14
Sub-CPMK5	14	14	2										
Sub-CPMK6	14	14	2										
	100	100	14										
Deskripsi Singkat MK													
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran													
Pustaka	Utama :												
	(1) Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Andi;												
	(2) Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2014). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Edisi 2. Salemba Empat;												
	(3) Mohamad, Ismail (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Bumi Aksara;												
	(4) Ashworth, Rachel, Boyne, George, and Entwistle, Tom (Eds.) (2010). Public Service Improvement: Theories and Evidence. Oxford University Press;												
	(5) Shim, Jae K. and Siegel, Joel G. (2008). Budgeting Basics and Beyond. 3rd Edition. John Wiley and Sons.												
Pendukung :													
	(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;												
	(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;												
	(3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terbitan terkini, tersedia melalui laman resmi BPK RI;												
	(4) Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2018;												
	(5) Sujarweni, V. Wiratna. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.												
Dosen Pengampu	Hasan Bau, S.E., M.Si.												
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -												

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar tata kelola	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	keuangan pemerintahan, kerangka regulasi utama (UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010, dan turunannya), serta menguraikan tahapan siklus keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban secara berurutan.	• Menguraikan pengertian tata kelola keuangan pemerintahan beserta prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sesuai amanat UU 17/2003 • Menjelaskan hierarki regulasi keuangan negara — UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010, PP 12/2019, dan Permendagri 77/2020 — beserta pokok substansi masing-masing • Membedakan peran dan kewenangan pengelola keuangan negara: Presiden/Kepala Daerah, Menteri Keuangan/PPKD, dan KPA/PPTK berdasarkan UU 1/2004	Tes/Unjuk Kerja: Kuis formatif pendek (10 soal pilihan ganda dan isian singkat) mengukur ketepatan mahasiswa mengidentifikasi regulasi yang mengatur setiap tahap siklus keuangan negara; kriteria: skor minimal 70 dari 100 untuk lulus ambang batas pemahaman awal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi tanya-jawab pengantar kuliah dinilai berdasarkan frekuensi dan relevansi pertanyaan/tangga	Dosen membuka kuliah dengan meminta mahasiswa memaparkan pertanyaan analitis dari telaah daring, kemudian menjelaskan konsep dasar tata kelola keuangan dan hierarki regulasi secara terstruktur menggunakan peta konsep di papan/proyektor; sesi diakhiri dengan diskusi singkat tentang relevansi regulasi bagi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, mengisi bagan hierarki regulasi pada lembar kerja yang dibagikan dosen, dan secara kolektif menyusun 'garis waktu siklus keuangan negara' di papan kelas	Dosen mengunggah slide pengantar tata kelola keuangan pemerintahan, rekaman video kuliah singkat (20-25 menit) yang membahas prinsip akuntabilitas dan hierarki regulasi, serta tautan dokumen regulasi resmi (UU 17/2003, PP 71/2010) ke LMS UNISAN sebelum sesi tatap muka (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan menelaah slide serta dokumen regulasi, menonton video kuliah, lalu mencatat poin-poin kunci hierarki regulasi dan peran pengelola keuangan untuk dibawa ke sesi luring MP — Metode Pembelajaran:	• Pengertian dan prinsip tata kelola keuangan pemerintahan (akuntabilitas, transparansi, efisiensi); • Hierarki regulasi keuangan negara: UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010, PP 12/2019, Permendagri 77/2020; • Peran dan kewenangan pengelola keuangan: Presiden/Kepala Daerah, Menteri Keuangan/PPKD, KPA/PPTK; • Tahapan siklus keuangan negara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menyebutkan tahapan siklus keuangan negara secara berurutan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban	pan; kejujuran dalam menyatakan pemahaman awal (integritas akademik) dicatat oleh dosen Tugas: Ringkasan mandiri satu halaman A4 (400-500 kata) yang memetakan hierarki regulasi keuangan negara dalam bentuk bagan sederhana beserta keterangan singkat fungsi tiap regulasi; dikumpulkan melalui LMS sebelum pertemuan minggu ke-2	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok kecil (3-4 orang) menganalisis cuplikan kasus pelanggaran pengelolaan keuangan dari IHPS BPK RI, mengidentifikasi regulasi mana yang dilanggar, lalu mempresentasikan temuan singkat (3 menit per kelompok) untuk didiskusikan bersama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun bagan hierarki regulasi keuangan negara disertai keterangan singkat peran masing-masing regulasi dalam siklus keuangan pemerintahan; bagan dibuat menggunakan aplikasi pengolah kata atau spreadsheet,	Case-Based Learning: mahasiswa mengamati satu cuplikan temuan BPK RI (dari IHPS terbaru di bpk.go.id) terkait pelanggaran regulasi keuangan daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai pemantik diskusi awal, kemudian menuliskan satu pertanyaan analitis yang akan diajukan pada sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(2014); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — IHPS terbitan terkini.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mencerminkan pemahaman mandiri (bukan salin-tempel), dan jika menggunakan bantuan AI Generatif wajib menyertakan deklarasi penggunaan sesuai Pedoman AI UNISAN Deliverable: Satu file dokumen (Word/PDF) berisi bagan hierarki regulasi dan keterangan singkat masing-masing (400-500 kata), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis formatif lanjutan (10 soal pilihan ganda dan uraian singkat) mengukur ketepatan mahasiswa menelusuri alur dokumen dari	BP — Mekanisme kuliah: Dosen melakukan review singkat bagan hierarki regulasi dari minggu ke-1, kemudian menjelaskan secara mendalam mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran menggunakan simulasi alur dokumen di papan kelas; dosen	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah slide dan infografis alur dokumen pelaksanaan anggaran (SPD, SPP, SPM, SP2D) serta materi komponen laporan keuangan pemerintah daerah ke LMS; dosen juga menyediakan tautan ke contoh laporan keuangan daerah	Bahan Kajian: • Mekanisme pelaksanaan anggaran: SPD, SPP, SPM, dan SP2D; • Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			SPD hingga SP2D dan mengidentifikasi komponen laporan keuangan; kriteria: jawaban uraian dinilai berdasarkan ketepatan terminologi dan kesesuaian dengan regulasi, skor minimal 70 Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam simulasi alur dokumen pelaksanaan anggaran di kelas dinilai dari ketepatan mahasiswa menempatkan dokumen pada tahap yang benar; sikap kolaboratif dan kejujuran dalam mengakui kesalahan	memberikan umpan balik atas diagram alur yang disiapkan mahasiswa dari sesi daring (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara berpasangan menelusuri alur dokumen pada lembar kerja simulasi yang disiapkan dosen, memasangkan setiap dokumen (SPD/SPP/SPM/SP2D) dengan dasar regulasinya, lalu mendiskusikan implikasi jika salah satu dokumen tidak diterbitkan tepat waktu MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok kecil mendiskusikan kasus ketidakpatuhan dari IHPS BPK RI yang telah ditelaah secara daring, mengidentifikasi tahap	Kawasan Timur Indonesia yang dapat diunduh dari SIKD/SIPD Kemendagri (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah infografis alur dokumen, mengunduh satu contoh laporan keuangan daerah dari SIKD/SIPD, dan mengidentifikasi secara mandiri komponen LRA, Neraca, LO, LAK, serta CaLK yang tersedia pada laporan tersebut sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa mengamati satu temuan BPK RI terkait ketidakpatuhan dalam pelaksanaan/penatausahaan anggaran (diambil dari IHPS terbaru), mengidentifikasi tahap	• Komponen laporan keuangan pemerintah daerah: LRA, Neraca, LO, LAK, CaLK sesuai PP 71/2010; • Pertanggungjawaban keuangan daerah dan implikasi ketidakpatuhan berdasarkan temuan BPK RI; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — IHPS terbitan terkini.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			simulasi mencerminkan nilai integritas Tugas: Diagram alur pelaksanaan anggaran (flowchart) yang menggambarkan urutan SPD-SPP-SPM-SP2D beserta penjelasan singkat tiap tahap (300-400 kata), dikumpulkan melalui LMS sebelum pertemuan minggu ke-3	siklus yang dilanggar dan regulasi yang relevan, kemudian menyajikan analisis singkat di depan kelas (4 menit per kelompok) untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu membuat diagram alur pelaksanaan anggaran daerah yang menggambarkan urutan penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D, dilengkapi penjelasan singkat fungsi dan dasar regulasi tiap dokumen; mahasiswa juga menambahkan satu paragraf yang menghubungkan alur tersebut dengan komponen laporan keuangan yang dihasilkan pada tahap pelaporan; deklarasi penggunaan AI Generatif	siklus yang bermasalah, dan menuliskan catatan analisis singkat untuk dibawa ke diskusi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib dicantumkan jika digunakan Deliverable: Satu file dokumen (Word/PDF) berisi flowchart alur dokumen pelaksanaan anggaran dan penjelasan tertulis (300-400 kata), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-3			
3,4,5	Sub-CPMK2: Membedakan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah — mencakup struktur APBN/APBD, proses penyusunan KUA-PPAS, dan prinsip money follows program — serta menerapkan identifikasi pos anggaran pada dokumen anggaran nyata.	Mahasiswa mampu: • Membedakan struktur APBN dan APBD — meliputi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan — beserta dasar hukum masing-masing berdasarkan UU 17/2003 dan PP 12/2019 • Menjelaskan prinsip money follows program dan implikasinya terhadap penentuan prioritas	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi pos anggaran: mahasiswa diberikan penggalan dokumen APBD daerah Kawasan Timur Indonesia dan diminta mengklasifikasikan setiap pos ke dalam komponen pendapatan, belanja, atau	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membangun keterkaitan dari siklus keuangan yang dipelajari di minggu ke-1 dan ke-2 ke tahap penganggaran, kemudian menjelaskan struktur APBN/APBD dan prinsip money follows program menggunakan dokumen APBD nyata yang ditampilkan di proyektor; dosen memfasilitasi diskusi interaktif mengenai perbedaan kewenangan pusat dan daerah (tatap	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah slide struktur APBN/APBD, infografis perbandingan kedua jenis anggaran, serta satu dokumen APBD daerah Kawasan Timur Indonesia (dapat diakses dari SIKD/SIPD) ke LMS sebagai bahan telaah mandiri (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah dokumen APBD yang	Bahan Kajian: • Struktur APBN: komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai UU 17/2003; • Struktur APBD: komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020; • Prinsip money follows program dan implikasinya terhadap	22

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		belanja daerah • Mengidentifikasi pos-pos anggaran pada dokumen APBD nyata dari pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan merujuk pada struktur yang diatur Permendagri 77/2020 • Membandingkan karakteristik penganggaran pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD) dari sisi sumber pendapatan, kewenangan belanja, dan mekanisme pembiayaan	pembiayaan sesuai Permendagri 77/2020; kriteria: ketepatan klasifikasi minimal 80% pos yang tersedia Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi perbandingan APBN-APBD dinilai dari kemampuan mahasiswa memberikan argumen berbasis regulasi, bukan opini umum; sikap menghargai perbedaan perspektif antar kelompok mencerminkan nilai harmoni Tugas:	muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan lembar kerja spreadsheet untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pos-pos anggaran dari dokumen APBD yang telah ditelaah sebelumnya, kemudian mempresentasikan hasil identifikasi (5 menit per kelompok) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menganalisis apakah program-program prioritas dalam APBD yang dikaji selaras dengan prinsip money follows program, menggunakan data SIKD/SIPD; hasil analisis menjadi bahan diskusi kelas dan bagian dari proyek tabel	disediakan, mengidentifikasi secara mandiri komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta menandai pos-pos yang mencerminkan prinsip money follows program sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mulai mengerjakan tabel perbandingan APBN-APBD secara mandiri menggunakan aplikasi spreadsheet, dengan data yang bersumber dari dokumen APBD resmi yang diunduh dari SIKD/SIPD Kemendagri — tahap ini merupakan bagian awal dari proyek analisis anggaran yang berlanjut di minggu ke-4 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	prioritas belanja daerah; • Perbandingan penganggaran pemerintah pusat dan daerah: sumber pendapatan, kewenangan belanja, mekanisme pembiayaan; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Shim dan Siegel (2008); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tabel perbandingan APBN dan APBD (minimal 6 dimensi perbandingan: dasar hukum, sumber pendapatan, jenis belanja, mekanisme pembiayaan, pihak yang menyusun, dan mekanisme pengesahan) beserta analisis singkat implikasi prinsip money follows program pada satu APBD daerah Kawasan Timur Indonesia (400-500 kata), dikumpulkan melalui LMS sebelum pertemuan minggu ke-4	perbandingan yang dikerjakan secara individu Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun tabel perbandingan APBN dan APBD pada minimal 6 dimensi menggunakan aplikasi spreadsheet atau pengolah kata, dilengkapi analisis singkat mengenai penerapan prinsip money follows program pada APBD satu kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia yang datanya diakses dari SIKD/SIPD; mahasiswa wajib mencantumkan sumber data dan deklarasi penggunaan AI Generatif jika digunakan Deliverable: Satu file dokumen (Word/PDF atau spreadsheet) berisi tabel perbandingan 6 dimensi dan analisis tertulis (400-			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				500 kata), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tugas simulasi terstruktur: mahasiswa mengisi template spreadsheet APBD sederhana yang telah disiapkan dosen, menempatkan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada kode rekening yang tepat sesuai Permendagri 77/2020; kriteria penilaian: ketepatan kode rekening, keseimbangan anggaran (pendapatan +	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan mengaitkan prinsip money follows program (minggu ke-3) ke mekanisme KUA-PPAS, kemudian memfasilitasi sesi praktik terbimbing pengisian template simulasi APBD di laboratorium komputer atau menggunakan laptop masing-masing; dosen berkeliling memberikan umpan balik langsung pada pekerjaan setiap mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan simulasi penyusunan APBD pada template spreadsheet secara mandiri dengan bimbingan dosen,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template spreadsheet simulasi APBD, slide mekanisme penyusunan KUA-PPAS, dan contoh dokumen KUA-PPAS nyata dari satu pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia ke LMS; dosen menyediakan panduan pengisian template dalam bentuk video tutorial singkat (10-15 menit) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template spreadsheet dan dokumen KUA-PPAS, menonton video tutorial, lalu mulai mengisi bagian pendapatan	Bahan Kajian: • Mekanisme penyusunan KUA dan PPAS sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020; • Keterkaitan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD sebagai satu kesatuan perencanaan-penganggaran; • Simulasi penyusunan APBD: pengkodean rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan; • Evaluasi kesesuaian prioritas program KUA-PPAS dengan prinsip money follows program; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pembiayaan neto = belanja), dan kelengkapan komponen minimal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi simulasi dan diskusi kesesuaian KUA-PPAS dinilai dari kontribusi mahasiswa dalam memberikan argumentasi berbasis regulasi; sikap adaptif terhadap koreksi dan keterbukaan menerima umpan balik mencerminkan nilai adaptabilitas Tugas: Dokumen simulasi APBD sederhana	mencocokkan setiap pos anggaran dengan kode rekening yang diatur Permendagri 77/2020, dan memverifikasi keseimbangan anggaran yang dihasilkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mempresentasikan draf simulasi APBD mereka kepada pasangan (peer review) untuk saling memberikan koreksi atas ketepatan kode rekening dan kesesuaian dengan prinsip money follows program; temuan peer review didokumentasikan sebagai bagian dari narasi akhir yang diserahkan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyelesaikan simulasi	daerah pada template simulasi secara mandiri menggunakan data dari dokumen APBD yang telah diakses pada minggu ke-3 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa melanjutkan proyek analisis anggaran dari minggu ke-3 dengan mengisi template simulasi APBD — tahap ini merupakan kelanjutan langsung dari tabel perbandingan APBN-APBD yang telah dikerjakan, kini diarahkan ke praktik penyusunan dokumen anggaran berbasis data nyata Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Shim dan Siegel (2008); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(spreadsheet) satu pemerintah daerah fiktif atau nyata di Kawasan Timur Indonesia, mencakup komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan total minimal 15 pos anggaran, disertai narasi singkat yang menjelaskan keterkaitan KUA-PPAS dengan APBD yang disusun (300-400 kata), dikumpulkan melalui LMS sebelum pertemuan minggu ke-5	penyusunan APBD sederhana menggunakan template spreadsheet yang disediakan dosen, mencakup minimal 15 pos anggaran pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan kode rekening sesuai Permendagri 77/2020; simulasi dilengkapi narasi singkat yang menjelaskan keterkaitan antara dokumen KUA-PPAS dan APBD yang disusun serta refleksi atas penerapan prinsip money follows program; deklarasi penggunaan AI Generatif wajib dicantumkan jika digunakan Deliverable: Satu file spreadsheet (Excel/LibreOffice Calc) berisi simulasi APBD minimal 15 pos dan satu file narasi (Word/PDF) 300-400 kata, diunggah bersama ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-5			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi komponen APBD: mahasiswa membaca penggalan dokumen APBD nyata kemudian menentukan klasifikasi pos anggaran beserta dasar regulasinya; dinilai berdasarkan ketepatan klasifikasi dan kemampuan mengaitkan pos dengan program prioritas Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok saat menelaah	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu diskusi pleno membandingkan temuan mahasiswa dari berbagai APBD daerah Kawasan Timur Indonesia; dosen menyajikan simulasi mini penyusunan KUA-PPAS menggunakan spreadsheet yang ditayangkan via proyektor, menunjukkan bagaimana program prioritas diterjemahkan ke pos anggaran spesifik; sesi ditutup dengan koreksi bersama lembar kerja (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil identifikasi pos anggaran dokumen APBD pilihannya (masing-masing 3-5 menit), merespons pertanyaan rekan dan dosen, lalu melengkapi lembar kerja analisis	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan berdurasi 20-30 menit tentang perbandingan struktur APBN dan APBD beserta infografis alur penyusunan KUA-PPAS pada LMS UNISAN; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik: 'Bagaimana prinsip money follows program tercermin dalam pos belanja pada APBD daerah yang Anda pilih?' (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh materi slide, membaca ringkasan regulasi PP 12/2019 Bab IV dan Permendagri 77/2020, mengakses portal SIKD/SIPD untuk	Bahan Kajian: • Struktur dan komponen APBN serta APBD: pendapatan, belanja, dan pembiayaan; • Proses penyusunan KUA-PPAS: tahapan, pelaku, dan dokumen kunci; • Prinsip money follows program dalam penganggaran berbasis kinerja; • Identifikasi dan klasifikasi pos anggaran pada dokumen APBD nyata daerah Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Shim dan Siegel (2008); Peraturan Pemerintah Nomor 12	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dokumen APBD: kualitas pertanyaan/tanggapan yang berbasis data, sikap kritis dan jujur dalam menyampaikan temuan perbedaan struktur pusat-daerah, serta keterbukaan terhadap perspektif anggota kelompok lain Tugas: Lembar kerja analisis dokumen APBD: mahasiswa memilih satu APBD kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (diunduh dari SIKD/SIPD), mengidentifikasi seluruh komponen belanja	berdasarkan masukan diskusi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi pleno berbasis dokumen APBD nyata dilanjutkan simulasi spreadsheet KUA-PPAS untuk memperkuat pemahaman keterkaitan antara perencanaan program dan alokasi anggaran Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual mengunduh dokumen APBD satu kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia dari portal SIKD/SIPD, kemudian menyusun lembar kerja analisis yang memuat: (1) tabel rekapitulasi komponen pendapatan, belanja, dan	mengunduh satu dokumen APBD daerah Kawasan Timur Indonesia, lalu menjawab pertanyaan pemantik di forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah dokumen APBD nyata sebagai kasus, mengidentifikasi komponen dan mencatat pertanyaan analitis yang akan dibawa ke sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berdasarkan klasifikasi Permendagri 77/2020, dan menjelaskan keterkaitan tiga program utama dengan prinsip money follows program; panjang narasi analisis 500-700 kata disertai tabel rekapitulasi pos anggaran	pembiayaan sesuai Permendagri 77/2020; (2) identifikasi minimal tiga pos belanja modal yang mencerminkan prinsip money follows program; (3) narasi penjelasan 500-700 kata yang menguraikan keterkaitan antara program prioritas daerah dan alokasi anggaran yang ditemukan; serta (4) pernyataan penggunaan AI Generatif apabila digunakan sebagai alat bantu kerangka analisis. Deliverable: File lembar kerja spreadsheet (format .xlsx) berisi tabel rekapitulasi pos anggaran dan file narasi analisis (format .docx) 500-700 kata, dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat tiga hari setelah sesi luring			
6,7	Sub-CPMK3: Menganalisis permasalahan akuntabilitas	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan minimal 2 kasus temuan BPK atau penyimpangan anggaran yang terdokumentasi, dengan kerangka analisis kebijakan fiskal.	- Menjelaskan kerangka analisis kebijakan fiskal yang mencakup dimensi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan literatur dan regulasi yang berlaku - Mengidentifikasi minimal dua kasus temuan BPK atau penyimpangan anggaran yang terdokumentasi di daerah Kawasan Timur Indonesia dari IHPS BPK terbitan terkini - Menguraikan akar permasalahan (root cause) setiap temuan BPK yang dipilih dengan menggunakan minimal dua dimensi analisis: aspek regulasi, kapasitas SDM, atau sistem pengendalian intern	Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri pada minggu ini; penilaian kognitif diintegrasikan ke dalam rubrik analisis kasus yang mencakup: ketepatan identifikasi temuan BPK (20%), kedalaman uraian akar masalah (30%), dan ketajaman penerapan kerangka analisis kebijakan fiskal (30%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok analisis kasus: kualitas argumentasi berbasis data	Dosen memaparkan kerangka analisis kebijakan fiskal (dimensi akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian intern) menggunakan contoh temuan BPK yang ditayangkan; dosen memfasilitasi diskusi kelompok (3-4 orang) di mana setiap kelompok mempresentasikan dua kasus temuan BPK pilihannya dan menerima umpan balik dari rekan serta dosen (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi kelompok untuk saling menguji ketajaman identifikasi akar masalah, melengkapi matriks analisis berdasarkan masukan, dan menyepakati dua kasus utama yang akan dikembangkan lebih lanjut pada Minggu 7	Dosen mengunggah panduan penggunaan portal BPK RI (bpk.go.id) untuk mengakses IHPS dan laporan hasil pemeriksaan spesifik daerah Kawasan Timur Indonesia; dosen menyediakan template matriks analisis kasus di LMS dan membuka forum diskusi dengan pertanyaan: 'Pola kelemahan tata kelola apa yang paling sering muncul dalam temuan BPK di daerah yang Anda telaah?' (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses portal BPK RI, mengunduh IHPS terbitan terkini, memilih dan membaca minimal dua temuan BPK yang relevan untuk daerah Kawasan Timur Indonesia, lalu mengisi	- Kerangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah; - Dimensi analisis kebijakan fiskal: regulasi, pengendalian intern, dan kapasitas kelembagaan; - Temuan BPK dan penyimpangan anggaran di daerah Kawasan Timur Indonesia: pola dan tipologi; - Penggunaan IHPS BPK sebagai data primer analisis tata kelola keuangan daerah; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Badan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menerapkan kerangka analisis kebijakan fiskal untuk memetakan hubungan antara temuan penyimpangan anggaran dan kelemahan tata kelola keuangan daerah pada kasus yang dipilih	IHPS BPK, kejujuran dalam mengakui keterbatasan data (Integrity), dan kemampuan berkolaborasi dalam memetakan masalah lintas dimensi (Harmony); dinilai dari frekuensi kontribusi bermakna dan kualitas tanggapan terhadap kelompok lain Tugas: Draf awal matriks analisis kasus: tabel dua kolom kasus temuan BPK beserta uraian akar masalah dan dimensi tata kelola yang berdampak;	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi dan diskusi kelompok berbasis temuan BPK nyata; dosen berperan sebagai fasilitator yang mendorong kedalaman analisis akar masalah dan menghindari analisis yang bersifat deskriptif semata Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara berkelompok (3-4 orang) menyusun draf awal matriks analisis kasus yang memuat: (1) identifikasi minimal dua temuan BPK atau penyimpangan anggaran terdokumentasi di daerah Kawasan Timur Indonesia beserta sumber IHPS yang dirujuk; (2) uraian akar masalah setiap temuan dari minimal dua dimensi (regulasi,	bagian pertama template matriks analisis kasus (identifikasi temuan) sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah dokumen hasil pemeriksaan BPK sebagai sumber data primer untuk membangun pemahaman kontekstual tentang permasalahan akuntabilitas nyata Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS terbitan terkini).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			panjang narasi pendukung 400-600 kata, dikumpulkan sebagai bahan kerja untuk Minggu 7	kapasitas SDM, atau pengendalian intern); (3) peta awal keterkaitan antara temuan dan kelemahan tata kelola menggunakan kerangka analisis kebijakan fiskal; serta (4) pernyataan pembagian tugas anggota kelompok dan deklarasi penggunaan AI Generatif apabila dimanfaatkan. Draf ini menjadi fondasi untuk dikembangkan menjadi dokumen rekomendasi kebijakan pada Minggu 7. Deliverable: File matriks analisis kasus (format tabel .docx atau .xlsx) disertai narasi pendukung 400-600 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat dua hari sebelum sesi luring Minggu 7			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis tersendiri;	BP — Mekanisme kuliah: Setiap kelompok mempresentasikan dokumen rekomendasi kebijakan fiskal (10-12	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah contoh dokumen rekomendasi kebijakan fiskal yang baik	Bahan Kajian: • Analisis hubungan kausal: kelemahan pengendalian intern dan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penilaian analisis kognitif (C4) diukur melalui rubrik dokumen kebijakan yang mencakup: kedalaman analisis hubungan kausal (25%), spesifisitas dan kelayakan rekomendasi (30%), integrasi perspektif pemangku kepentingan (20%), serta kualitas argumentasi berbasis bukti dan regulasi (25%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi lisan dan respons terhadap pertanyaan: kemampuan mempertahankan	menit presentasi dan 5-8 menit tanya jawab); dosen dan mahasiswa lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan rubrik yang tersedia; dosen memandu diskusi pleno untuk mengidentifikasi pola rekomendasi lintas kelompok dan mengaitkannya dengan kerangka reformasi tata kelola keuangan daerah secara nasional (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak presentasi kelompok lain, memberikan umpan balik berbasis rubrik, dan mencatat perbedaan pendekatan analisis antar kelompok sebagai bahan refleksi pembelajaran; setelah diskusi pleno, kelompok memiliki waktu 15 menit untuk mencatat perbaikan akhir sebelum pengumpulan final	(anonim/simulasi) sebagai referensi format di LMS; dosen membuka sesi konsultasi asinkron via forum LMS bagi kelompok yang memerlukan panduan penajaman rekomendasi sebelum presentasi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melengkapi dan menyempurnakan draf matriks analisis dari Minggu 6 menjadi dokumen rekomendasi kebijakan utuh, mengintegrasikan umpan balik dari sesi sebelumnya, dan mengunggah draf final ke LMS sebagai bahan presentasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mahasiswa	penyimpangan anggaran; • Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal berbasis bukti temuan BPK; • Perspektif pemangku kepentingan dalam reformasi tata kelola keuangan daerah; • Format dan standar penulisan dokumen rekomendasi kebijakan publik; • Digitalisasi SAKIP/LAKIP sebagai inovasi penguatan akuntabilitas keuangan daerah; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Peraturan Pemerintah Nomor 12	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			argumentasi secara etis (Integrity), kreativitas dalam merumuskan solusi yang melampaui deskripsi masalah (Creativity), dan orientasi pada perbaikan layanan publik daerah (Service); dinilai dari kejelasan penyampaian dan keterbukaan menerima umpan balik kritis Tugas: Dokumen rekomendasi kebijakan fiskal kelompok: minimum 1.000 kata, mencakup analisis akar masalah, matriks rekomendasi (masalah, rekomendasi,	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan peer review dokumen rekomendasi kebijakan berbasis kasus BPK nyata; mendorong nilai Harmony melalui kolaborasi lintas kelompok dalam menemukan solusi sistemik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan draf Minggu 6 menjadi dokumen rekomendasi kebijakan fiskal final yang memuat: (1) ringkasan eksekutif 150-200 kata; (2) analisis hubungan kausal antara kelemahan pengendalian intern dan penyimpangan anggaran pada dua kasus BPK yang dipilih; (3) matriks rekomendasi berisi minimal dua rekomendasi	mengembangkan produk nyata berupa dokumen rekomendasi kebijakan fiskal yang dapat digunakan sebagai referensi pembenahan tata kelola keuangan daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS terbitan terkini).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			indikator keberhasilan, pemangku kepentingan), dan refleksi nilai tata kelola yang baik; dengan deklarasi penggunaan AI Generatif apabila dimanfaatkan	spesifik per kasus lengkap dengan indikator keberhasilan, pemangku kepentingan penanggung jawab, dan dasar regulasi; (4) perspektif lintas pemangku kepentingan; serta (5) pernyataan orisinalitas dan deklarasi penggunaan AI Generatif apabila dimanfaatkan sebagai alat bantu kerangka atau bahasa. Deliverable: Dokumen rekomendasi kebijakan fiskal (format .docx) minimum 1.000 kata disertai matriks rekomendasi (tabel di dalam dokumen atau lampiran .xlsx), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat hari pelaksanaan sesi luring Minggu 7 sebelum presentasi dimulai; versi final pasca-revisi dikumpulkan paling lambat tiga hari setelah sesi luring			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester : Cakupan: Sub-CPMK1–Sub-CPMK3						

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9,10,11	Sub-CPMK4: Menganalisis pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah — mencakup mekanisme SP2D, pembukuan berbasis SAP (PP 71/2010), dan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, CaLK) — melalui telaah dokumen laporan keuangan daerah.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan alur mekanisme SP2D — dari pengajuan SPP, verifikasi SPM, hingga penerbitan SP2D — sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 secara runtut dan akurat • Mengidentifikasi dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang wajib dihasilkan pada setiap tahap siklus pelaksanaan anggaran • Membedakan basis akrual dalam pembukuan berbasis SAP (PP 71/2010) dari praktik pembukuan kas murni melalui perbandingan dokumen nyata	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian difokuskan pada kuis singkat lisan/tertulis (5 menit) tentang urutan mekanisme SP2D — dinilai berdasarkan ketepatan urutan dokumen dan kesesuaian regulasi PP 12/2019 Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok telaah dokumen laporan keuangan daerah: kemampuan mengajukan pertanyaan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelas berbasis temuan mahasiswa dari telaah LKPD daring; dosen mengklarifikasi miskonsepsi tentang mekanisme SP2D dan basis akrual SAP menggunakan contoh dokumen yang ditayangkan melalui proyektor; sesi diakhiri dengan kuis lisan singkat tentang urutan dokumen SP2D (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil telaah awal LKPD secara berpasangan (5 menit per pasangan), dilanjutkan diskusi pleno yang dipandu dosen; mahasiswa menyempurnakan lembar kerja berdasarkan umpan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah pendek (15–20 menit) yang menjelaskan alur SP2D dan struktur pembukuan berbasis SAP (PP 71/2010) ke LMS, dilengkapi anotasi pada slide tentang perbedaan basis kas dan akrual; dosen membuka forum diskusi asinkron di LMS untuk tanya-jawab selama 48 jam (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video, mengunduh template lembar kerja peta alur SP2D dari LMS, mengakses dokumen LKPD daerah pilihan melalui portal BPK RI atau SIKD/SIPD, lalu mengunggah lembar kerja awal sebelum sesi	Bahan Kajian: • Mekanisme pelaksanaan anggaran: alur SP2D dari SPP, SPM, hingga SP2D sesuai PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020; • Pembukuan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71/2010: basis akrual dan dokumen penatausahaan; • Komponen laporan keuangan pemerintah daerah: LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan CaLK; • Telaah dokumen LKPD nyata pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad	22

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menelaah dokumen laporan keuangan daerah (LRA, Neraca, LO, CaLK) suatu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk menentukan kesesuaiannya dengan SAP	berbasis data, ketepatan referensi regulasi, dan sikap integritas dalam mengutip sumber primer secara transparan Tugas: Lembar kerja individual: peta alur SP2D dan identifikasi komponen empat laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, CaLK) dari satu dokumen LKPD daerah di Kawasan Timur Indonesia yang diunduh dari portal resmi; panjang maksimal dua halaman A4 plus lampiran salinan halaman LKPD yang dirujuk	balik kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi dan diskusi pleno berbasis dokumen LKPD nyata pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia, dengan penekanan pada identifikasi kesesuaian komponen laporan terhadap PP 71/2010 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual mengunduh satu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia melalui portal BPK RI atau SIKD/SIPD, kemudian menyusun lembar kerja yang memuat: (1) peta alur SP2D dari SPP hingga	luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah dokumen LKPD nyata sebagai kasus, mengidentifikasi komponen laporan keuangan, dan membandingkan dengan ketentuan SAP sebelum didiskusikan bersama di kelas luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(2019); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SP2D lengkap dengan dokumen di setiap tahap; (2) identifikasi dan ringkasan empat komponen laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, CaLK) dari LKPD tersebut; serta (3) penilaian singkat kesesuaian format LKPD dengan ketentuan SAP PP 71/2010. Penggunaan AI generatif wajib dideklarasikan jika digunakan sebagai bantuan kerangka — analisis dan penilaian tetap milik mahasiswa. Deliverable: Lembar kerja tertulis (maksimal dua halaman A4, TNR 12, spasi 1,5) dilampiri halaman LKPD yang dirujuk, dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi luring minggu ini			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop kelas berbasis data spreadsheet yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan teknis rekonsiliasi antar-	Bahan Kajian: Keterkaitan logis antar-komponen laporan keuangan daerah: LRA,	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian melalui unjuk kerja rekonsiliasi spreadsheet — dinilai berdasarkan ketepatan formula, kesesuaian hasil rekonsiliasi dengan angka LKPD, dan kelengkapan dokumentasi sumber data Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok analisis laporan keuangan: ketajaman identifikasi selisih angka, kemampuan merujuk pasal SAP PP 71/2010 yang relevan, dan	telah disiapkan mahasiswa; dosen menayangkan contoh rekonsiliasi yang benar dan salah untuk didiskusikan secara komparatif; dosen memberikan umpan balik langsung terhadap temuan kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok mempresentasikan hasil rekonsiliasi dan temuan inkonsistensi (10 menit per kelompok); diskusi pleno membahas pola umum kelemahan penyajian LKPD di Kawasan Timur Indonesia; mahasiswa memperbarui spreadsheet berdasarkan koreksi kelas MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan workshop berbasis spreadsheet: kelompok mengerjakan rekonsiliasi	komponen laporan keuangan (tutorial spreadsheet) dan contoh anotasi CaLK ke LMS; dosen menyediakan template spreadsheet rekonsiliasi yang dapat diunduh; forum diskusi LMS dibuka untuk konsultasi teknis rekonsiliasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template spreadsheet, mengisi data dari LKPD yang dipilih, mencatat selisih yang ditemukan, dan mendiskusikan temuan awal di forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa menjalankan proyek rekonsiliasi laporan keuangan nyata sebagai output terukur	Neraca, LO, dan CaLK sesuai SAP PP 71/2010; • Teknik rekonsiliasi antar-komponen laporan keuangan menggunakan spreadsheet; • Telaah dan penilaian kelengkapan CaLK: kebijakan akuntansi dan pengungkapan pos material; • Analisis kualitas penyajian LKPD pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Sujarweni (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			nilai kreativitas dalam mendeteksi pola inkonsistensi Tugas: Laporan analisis kelompok (3–4 orang): rekonsiliasi antar-komponen LKPD dan telaah CaLK, panjang maksimal empat halaman A4 plus lampiran file spreadsheet rekonsiliasi	data laporan keuangan nyata, mempresentasikan temuan, dan merevisi berdasarkan umpan balik dosen dan sesama kelompok Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3–4 orang) melanjutkan telaah LKPD yang dipilih pada minggu 9 dengan mengerjakan dua tugas: (1) rekonsiliasi antar-komponen laporan keuangan (LRA vs Neraca, LRA vs LO) menggunakan template spreadsheet yang disediakan dosen — setiap selisih dicatat beserta dugaan penyebabnya merujuk SAP PP 71/2010; (2) telaah naratif bagian CaLK untuk menilai kelengkapan pengungkapan kebijakan akuntansi dan pos-pos material. Laporan memuat bagian kesimpulan tentang kualitas penyajian laporan	yang dibangun secara bertahap dari telaah dokumen minggu sebelumnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				keuangan daerah tersebut. Deklarasi penggunaan AI generatif wajib dicantumkan jika digunakan. Deliverable: Laporan analisis kelompok (maksimal empat halaman A4, TNR 12, spasi 1,5) dan file spreadsheet rekonsiliasi (Excel/LibreOffice), keduanya dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi luring minggu 11			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian tertulis individu (Sub-CPMK4, bobot 22%): analisis kasus LKPD fiktif/nyata dalam kondisi terkontrol — mencakup identifikasi komponen laporan, deteksi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (12 menit presentasi + 8 menit tanya-jawab per kelompok); dosen memberikan umpan balik terstruktur berbasis rubrik setelah setiap presentasi; sesi diakhiri dengan ujian tertulis individu untuk menilai pencapaian Sub-CPMK4 secara komprehensif (tatap muka	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian evaluasi komprehensif dan panduan penyusunan matriks rekomendasi ke LMS; dosen menyediakan sesi konsultasi daring (30 menit per kelompok) melalui video call untuk finalisasi laporan sebelum presentasi luring (via LMS;	Bahan Kajian: • Evaluasi kesesuaian menyeluruh LKPD dengan SAP PP 71/2010 menggunakan rubrik terstruktur; • Penyusunan matriks rekomendasi perbaikan pelaporan keuangan daerah berbasis bukti dokumen;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ketidaksesuaian dengan SAP PP 71/2010, dan formulasi rekomendasi perbaikan; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi masalah, kedalaman analisis, dan kualitas rekomendasi (rubrik empat kriteria: ketepatan regulasi, kelengkapan analisis, logika argumen, dan orisinalitas rekomendasi) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi kelompok dan kontribusi dalam sesi tanya-jawab: kemampuan	di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan evaluasi komprehensif LKPD dan matriks rekomendasi; kelompok lain berperan sebagai pembahas kritis; ujian tertulis individu dilaksanakan pada 45 menit akhir pertemuan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi dan ujian tertulis: kelompok mempublikasikan hasil proyek analisis, diikuti penilaian individu untuk memverifikasi penguasaan kompetensi pelaporan keuangan daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyelesaikan revisi laporan berdasarkan umpan balik minggu 10, menyusun matriks rekomendasi, dan mengunggah laporan final serta file presentasi ke LMS sebelum sesi luring; mahasiswa juga mengerjakan persiapan individual untuk ujian tertulis MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyempurnakan produk akhir analisis LKPD sebagai output proyek yang mencerminkan integrasi seluruh kompetensi Sub-CPMK4 dari minggu 9 hingga 11	• Keterkaitan kualitas pelaporan keuangan dengan akuntabilitas publik dan opini audit BPK; • Integrasi Sub-CPMK4: pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara komprehensif; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS terbitan terkini).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mempertahankan argumen dengan bukti dokumen, sikap jujur dalam mengakui keterbatasan analisis (nilai Integrity), dan kemampuan merespons pertanyaan lintas kelompok secara konstruktif Tugas: Laporan evaluasi komprehensif kelompok (5–6 halaman A4) yang merupakan versi final dan disempurnakan dari laporan minggu 10, dilengkapi matriks rekomendasi perbaikan dan file presentasi (maksimal 12 slide)	Kelompok menyusun laporan evaluasi komprehensif final sebagai penyempurnaan dari laporan minggu 10, dengan menambahkan: (1) evaluasi menyeluruh kesesuaian LKPD dengan SAP PP 71/2010 menggunakan rubrik terstruktur yang disediakan dosen; (2) matriks rekomendasi perbaikan (kolom: temuan, dasar regulasi, rekomendasi, dan pihak yang bertanggung jawab); serta (3) penilaian dampak kualitas LKPD terhadap akuntabilitas publik dan prospek opini audit. Laporan mencerminkan nilai Service (orientasi perbaikan layanan publik melalui tata kelola APBD yang akuntabel) dan Nationalism (komitmen terhadap keuangan negara yang bersih). Deklarasi penggunaan AI generatif wajib dicantumkan jika digunakan — analisis dan	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				rekomendasi sepenuhnya merupakan hasil penilaian mahasiswa. Deliverable: Laporan evaluasi komprehensif final kelompok (5–6 halaman A4, TNR 12, spasi 1,5) beserta matriks rekomendasi dan file presentasi (maksimal 12 slide), dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi luring; ujian tertulis individu dikerjakan di kelas pada sesi luring			
12,13	Sub-CPMK5: Mengevaluasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah — mencakup peran APIP, SPIP, dan mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK — serta menilai keterkaitan antara kualitas pengawasan dengan opini audit (WTP/WDP) pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan peran, fungsi, dan kewenangan APIP (Inspektorat Daerah) dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah sesuai kerangka regulasi yang berlaku • Menganalisis komponen dan implementasi Sistem	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian melalui hasil analisis studi kasus IHPS — dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi kelemahan SPIP,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelas berbasis temuan mahasiswa dari IHPS BPK; dosen memetakan pola umum kelemahan SPIP dan tindak lanjut rekomendasi BPK di Kawasan Timur Indonesia di papan tulis; dosen mengklarifikasi perbedaan peran APIP vs BPK dan implikasi opini audit terhadap	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi konseptual APIP, SPIP, dan opini audit ke LMS dalam format video kuliah dan slide beranotasi; dosen membagikan tautan langsung ke data IHPS BPK yang relevan dan panduan mengakses laporan hasil pemeriksaan melalui portal bpk.go.id; forum	Bahan Kajian: • Peran dan fungsi APIP (Inspektorat Daerah) dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah; • Komponen dan implementasi SPIP sesuai PP 60/2008: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di pemerintah daerah berdasarkan PP 60/2008 • Mengevaluasi mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendorong kepatuhan tindak lanjut • Mengidentifikasi hubungan antara kualitas pengawasan APIP dan SPIP dengan perolehan opini audit BPK (WTP, WDP, atau Tidak Wajar) pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia melalui telaah data IHPS BPK	relevansi kaitan dengan opini audit, dan kedalaman analisis kausal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi berbasis kasus IHPS: kemampuan mengajukan argumen berbasis data, sikap kritis namun konstruktif terhadap kinerja pengawasan pemerintah daerah (nilai Integrity dan Harmony), dan ketepatan penggunaan terminologi SPIP/APIP Tugas: Lembar analisis individual:	akuntabilitas daerah (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan temuan draf lembar analisis secara berpasangan (5 menit per pasangan); diskusi pleno membahas pola lintas daerah dan faktor kontekstual Kawasan Timur Indonesia yang memengaruhi kualitas pengawasan; mahasiswa menyempurnakan lembar analisis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan diskusi pleno berbasis data IHPS BPK: mahasiswa membandingkan temuan lintas pemerintah daerah, mengidentifikasi pola sistemik kelemahan SPIP, dan menghubungkannya	diskusi LMS dibuka untuk tanya-jawab konsep (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video kuliah, mengakses IHPS BPK melalui portal resmi, memilih satu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai objek analisis, dan menyusun draf lembar analisis sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis data IHPS BPK nyata sebagai kasus untuk mengidentifikasi pola kelemahan SPIP dan keterkaitannya dengan opini audit, membangun kompetensi evaluasi pengawasan secara mandiri sebelum	dan komunikasi, serta pemantauan; • Mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK dan faktor kepatuhan pemerintah daerah; • Keterkaitan kualitas APIP dan SPIP dengan opini audit BPK (WTP, WDP) pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; • Telaah data IHPS BPK sebagai sumber bukti kinerja pengawasan; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS terbitan terkini); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			identifikasi kelemahan SPIP dan pola tindak lanjut rekomendasi BPK dari satu entri IHPS BPK untuk satu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; panjang maksimal tiga halaman A4 plus referensi halaman IHPS yang dirujuk	dengan opini audit BPK Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual mengakses IHPS BPK terbitan terkini melalui portal bpk.go.id, memilih satu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia, lalu menyusun lembar analisis yang memuat: (1) ringkasan peran APIP dan kondisi implementasi SPIP pada daerah tersebut berdasarkan temuan IHPS; (2) pola dan status tindak lanjut rekomendasi BPK — berapa yang sudah selesai, dalam proses, atau belum ditindaklanjuti — beserta faktor penghambatnya; serta (3) penilaian keterkaitan antara kondisi pengawasan tersebut dan opini audit yang diperoleh daerah itu. Analisis harus mencerminkan nilai	didiskusikan di kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Integrity (kejujuran dalam membaca data BPK) dan Nationalism (komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang bersih). Deklarasi penggunaan AI generatif wajib dicantumkan jika digunakan. Deliverable: Lembar analisis individual (maksimal tiga halaman A4, TNR 12, spasi 1,5) dilampiri tangkapan layar atau fotokopi halaman IHPS yang dirujuk, dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi luring minggu ini			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis berbasis kasus pendek: disajikan ringkasan temuan BPK satu pemerintah daerah;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (15 menit) tentang kerangka evaluasi APIP dan lima komponen SPIP berdasarkan PP 60/2008 dan kaitannya dengan PP 12/2019; selanjutnya memfasilitasi presentasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul rangkuman regulasi APIP/SPIP ke LMS UNISAN, menyediakan tautan IHPS BPK RI terkini dan panduan penelusuran data SIKD/SIPD, serta membuka forum diskusi	Bahan Kajian: • Peran dan kewenangan APIP (Inspektorat Daerah) dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah; • Lima komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mahasiswa menganalisis kelemahan SPIP yang mendasarinya dan memprediksi opini audit yang paling mungkin beserta alasan regulatif — dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi komponen SPIP, kedalaman kausalitas, dan akurasi rujukan regulasi (PP 12/2019, Permendagri 77/2020) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based Learning: frekuensi kontribusi	singkat kelompok (10 menit per kelompok) dan sesi tanya jawab kritis tentang kasus masing-masing; menutup sesi dengan sintesis hubungan kualitas pengawasan dan opini WTP berbasis temuan kelas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan matriks kelemahan SPIP dan kronologi opini audit daerah pilihan, merespons pertanyaan kritis dari dosen dan rekan, serta memperbaiki analisis berdasarkan masukan yang diterima sebelum menyusun laporan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan presentasi panel: tiap kelompok menyajikan kasus pemerintah daerah	daring untuk tanya jawab analisis kasus sebelum sesi sinkron daring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh modul dari LMS, mengakses IHPS BPK RI melalui bpk.go.id untuk menelusuri data opini audit dan tindak lanjut rekomendasi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia, kemudian menyiapkan peta awal kelemahan SPIP daerah pilihan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara kelompok (3-4 orang) menganalisis kasus nyata satu pemerintah daerah KTI dari IHPS BPK RI — menelusuri riwayat opini audit, mengidentifikasi temuan	implementasinya di pemerintah daerah; • Mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK: prosedur, tenggat, dan konsekuensi regulatif; • Tipologi opini audit BPK (WTP, WDP, TMP, TW): kriteria dan implikasi bagi akuntabilitas daerah; • Analisis hubungan kualitas pengawasan internal dengan perolehan opini WTP pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			argumen berbasis data IHPS, kemampuan merespons pendapat rekan secara substantif, dan konsistensi menampilkan sikap jujur serta terbuka terhadap temuan kritis — dinilai dengan rubrik partisipasi empat level (sangat aktif, aktif, cukup, pasif) Tugas: Laporan analisis evaluatif APIP/SPIP: maksimum 1.500 kata, memuat (1) profil pengawasan daerah sampel KTI, (2) pemetaan kelemahan SPIP berbasis data IHPS, (3) matriks	KTI yang berbeda, kelas melakukan komparasi antar-kasus untuk menemukan pola umum kelemahan APIP/SPIP yang berulang di kawasan tersebut — mengembangkan kemampuan evaluasi komparatif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara kelompok (3-4 mahasiswa), pilih satu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki riwayat opini audit beragam (misalnya pernah WDP kemudian WTP, atau sebaliknya) dalam tiga tahun terakhir berdasarkan IHPS BPK RI. Evaluasi kualitas pengawasan internalnya dengan menelusuri: (1) peran dan kapasitas APIP/Inspektorat melalui data publik yang tersedia, (2) kelemahan	berulang terkait APIP/SPIP, dan menghubungkan pola temuan dengan perubahan opini audit dalam tiga tahun terakhir; hasil awal dibagikan di forum LMS untuk umpan balik rekan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — IHPS terbitan terkini.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			keterkaitan kelemahan-opini audit, dan (4) simpulan evaluatif — dikumpulkan melalui LMS UNISAN sebelum sesi minggu ke-14	SPIP yang tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, (3) mekanisme dan kelengkapan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh kepala daerah, serta (4) korelasi antara perbaikan/kemunduran pengendalian intern dengan perubahan opini audit. Susun laporan evaluatif dengan struktur yang ditetapkan. Deklarasikan secara eksplisit apabila menggunakan alat bantu AI Generatif dalam penyusunan kerangka analisis. Deliverable: Laporan analisis evaluatif APIP/SPIP dalam format dokumen Word, maksimum 1.500 kata (tidak termasuk matriks dan daftar pustaka), memuat profil daerah, matriks kelemahan SPIP empat kolom (temuan BPK, komponen SPIP terdampak, dampak			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terhadap opini, status tindak lanjut), narasi kausal, dan simpulan evaluatif — diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum sesi Minggu 14; file PowerPoint ringkasan (maksimum 8 slide) untuk presentasi panel di kelas			
14,15	Sub-CPMK6: Merancang rekomendasi perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang mencakup: rancangan mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut berbasis bukti — yang disajikan dalam dokumen kebijakan tertulis dan dipresentasikan secara kritis.	Mahasiswa mampu: - Merancang kerangka mekanisme pengawasan internal berbasis risiko yang memuat identifikasi risiko fiskal, prioritas pengawasan, dan indikator pemantauan untuk pemerintah daerah sampel - Menyusun strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP yang mencakup penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran APBD dan mekanisme	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini — penilaian difokuskan pada kualitas draf dokumen kebijakan dan proses perancangan; formatif melalui rubrik draf yang diperiksa dosen (komponen: kelengkapan kerangka risiko, keselarasan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (15 menit) tentang prinsip pengawasan berbasis risiko dan standar penyajian SAKIP/LAKIP yang akuntabel; memfasilitasi sesi peer review terstruktur antar kelompok (setiap kelompok mereview draf satu kelompok lain dengan panduan rubrik); menutup sesi dengan pleno sintesis — mengidentifikasi rekomendasi inovatif dan realistis yang muncul dari berbagai draf (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template dokumen kebijakan terstruktur (kerangka pengawasan berbasis risiko, tabel strategi SAKIP, matriks rencana tindak lanjut) ke LMS UNISAN beserta rubrik penilaian draf; membuka sesi konsultasi daring terjadwal (office hours virtual) untuk umpan balik awal draf kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: - Kerangka pengawasan internal berbasis risiko: identifikasi, prioritas, dan indikator pemantauan risiko fiskal daerah; - Strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP: penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran APBD dan digitalisasi pelaporan; - Rancangan rencana tindak lanjut rekomendasi BPK berbasis bukti: langkah,	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		verifikasi data kinerja • Mengintegrasikan temuan evaluasi Minggu 13 (kelemahan APIP/SPIP) sebagai basis argumentasi dalam draf rancangan rekomendasi kebijakan • Mengembangkan draf rencana tindak lanjut berbasis bukti yang mencantumkan langkah, pelaku bertanggung jawab, dan target waktu yang realistis • Menampilkan kreativitas dalam merancang mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap konteks kapasitas pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia • Menilai secara kritis draf rancangan rekan sejawat dan	strategi SAKIP dengan regulasi, dan kelayakan rencana tindak lanjut) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer review: kemampuan memberikan umpan balik spesifik dan berbasis kriteria (bukan opini umum), keterbukaan menerima masukan, dan kontribusi dalam diskusi pleno tentang pola rekomendasi lintas kelompok — dinilai dengan rubrik partisipasi tiga aspek (substansi, sikap kolegial, dan	Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draf dokumen kebijakan yang telah disusun, mempresentasikan pokok rancangan dalam format singkat (7 menit per kelompok), menerima umpan balik tertulis dari kelompok reviewer berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan, dan merevisi draf sesuai masukan untuk menjadi basis dokumen final Minggu 15 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi peer review terstruktur: setiap kelompok berperan sebagai reviewer untuk satu kelompok lain menggunakan lembar rubrik baku — mendorong kemampuan penilaian kritis, harmoni kolaboratif lintas kelompok, dan	Mahasiswa mengunduh template, melanjutkan analisis risiko fiskal daerah sampel menggunakan data IHPS BPK RI dan SIKD/SIPD, menyusun draf awal kerangka pengawasan berbasis risiko, dan mengunggah draf ke LMS sebelum sesi luring untuk dipertukarkan antar kelompok MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan draf dokumen kebijakan berbasis temuan evaluasi Minggu 13 — merancang peta risiko fiskal menggunakan spreadsheet (Excel/LibreOffice Calc), mengidentifikasi celah pengawasan, dan merumuskan strategi SAKIP yang terukur; pemanfaatan AI	pelaku, dan target waktu; • Prinsip dokumen kebijakan yang akuntabel dan orisinal: struktur, argumentasi berbasis data, dan penyajian rekomendasi fiskal; • Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD/SIPD) dan digitalisasi SAKIP sebagai solusi technopreneurship dalam penguatan tata kelola; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Shim dan Siegel (2008); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memberikan umpan balik konstruktif berbasis kriteria kebijakan yang terukur	konsistensi) Tugas: Draf dokumen kebijakan (bukan versi final): 8-12 halaman A4 termasuk matriks risiko dan rencana tindak lanjut — dikumpulkan via LMS UNISAN sebelum sesi untuk keperluan peer review di kelas; revisi pasca-peer-review dikumpulkan sebagai lampiran pada dokumen final Minggu 15	peningkatan kualitas dokumen kebijakan secara iteratif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Melanjutkan proyek kelompok dari Minggu 13, susun draf dokumen kebijakan yang memuat tiga komponen utama: (1) rancangan mekanisme pengawasan internal berbasis risiko — meliputi peta risiko fiskal daerah sampel (minimal 5 risiko teridentifikasi), prioritas pengawasan, dan indikator pemantauan triwulanan; (2) strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP — memuat penyelarasan indikator kinerja utama dengan sasaran APBD, mekanisme verifikasi, dan digitalisasi pelaporan sebagai opsi inovatif berbasis technopreneurship; serta (3) rencana tindak lanjut	Generatif diizinkan hanya untuk asistensi bahasa dan brainstorming kerangka awal dengan kewajiban deklarasi pada dokumen Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Indonesia — IHPS terbitan terkini.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berbasis bukti — memuat langkah spesifik, penanggung jawab, target waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Draf dikumpulkan sebelum sesi untuk peer review, lalu direvisi pasca-sesi. Deklarasikan penggunaan AI Generatif bila digunakan. Deliverable: Draf dokumen kebijakan dalam format Word, 8-12 halaman A4, memuat: halaman judul, ringkasan eksekutif (maksimum 200 kata), peta risiko fiskal (tabel spreadsheet yang disematkan atau dilampirkan), narasi tiga komponen utama, dan matriks rencana tindak lanjut (kolom: langkah, pelaku, target waktu, indikator keberhasilan) — diunggah ke LMS UNISAN paling lambat 2 jam sebelum sesi luring; revisi pasca-peer-review dilampirkan pada dokumen			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				final Minggu 15 sebagai bukti proses iteratif			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis — penilaian dilakukan melalui rubrik presentasi dan dokumen final; sesi tanya jawab panel (10 menit per kelompok) berfungsi sebagai ujian lisan formatif yang menilai kedalaman pemahaman, konsistensi argumentasi berbasis regulasi, dan kemampuan merespons pertanyaan kritis dengan tepat	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin sesi presentasi panel: tiap kelompok mempresentasikan dokumen kebijakan final (15 menit presentasi + 10 menit tanya jawab); dosen dan dua perwakilan mahasiswa dari kelompok lain bertindak sebagai panel penilai; setelah seluruh presentasi selesai, dosen memimpin diskusi pleno penutup untuk mensintesis pelajaran utama semester — menghubungkan perjalanan dari konsep tata kelola (Minggu 1) hingga rancangan kebijakan (Minggu 15) dan merefleksikan relevansinya bagi pembangunan Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi pengumpulan final via LMS UNISAN dan menyediakan jadwal urutan presentasi yang diunggah H-2 sebelum sesi; memberikan panduan final tentang kriteria penilaian rubrik presentasi dan dokumen; membuka kanal komunikasi untuk klarifikasi teknis terakhir (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunggah dokumen kebijakan final dan file PowerPoint ke LMS sebelum batas yang ditetapkan, memastikan kelengkapan lampiran (peta risiko, matriks tindak lanjut, deklarasi AI), dan menyiapkan diri	Bahan Kajian: • Integrasi komponen tata kelola keuangan pemerintahan: dari regulasi, penatausahaan APBD, pengendalian intern, hingga pengawasan berbasis risiko; • Penyusunan dan penyajian dokumen kebijakan fiskal yang akuntabel, orisinal, dan berbasis bukti empiris IHPS BPK RI; • Strategi penguatan SAKIP/LAKIP dan digitalisasi pelaporan kinerja sebagai solusi technopreneurship tata kelola daerah; • Komunikasi kebijakan publik: argumentasi berbasis regulasi dan data dalam forum	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan sebagai audience kritis: kualitas pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain (berbasis substansi, bukan formalitas), keterlibatan dalam diskusi pleno penutup semester, dan konsistensi menampilkan nilai harmoni serta service orientation dalam merespons presentasi rekan — dinilai dengan rubrik tiga level (kritis-substantif, pasif-formal, tidak aktif) Tugas:	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan dokumen kebijakan final menggunakan PowerPoint (maksimum 15 slide), merespons pertanyaan panel secara kritis, mencatat umpan balik akhir dari dosen untuk kepentingan pembelajaran, dan berpartisipasi aktif sebagai audience kritis bagi kelompok lain; pada pleno penutup, tiap kelompok berbagi satu refleksi tentang rekomendasi kebijakan yang paling relevan untuk konteks KTI MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi panel dan refleksi integratif: format panel mendorong akuntabilitas akademik dan mempertahankan argumen	untuk sesi tanya jawab panel dengan meninjau kembali data IHPS BPK RI dan regulasi yang dirujuk dalam dokumen MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning tahap presentasi dan penilaian: mahasiswa menyelesaikan siklus penuh proyek kebijakan dari analisis (Minggu 13) melalui perancangan iteratif (Minggu 14) hingga penyajian final — melatih kemampuan komunikasi kebijakan publik berbasis bukti yang merupakan kompetensi inti tata kelola keuangan pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	presentasi panel; • Refleksi integratif: relevansi tata kelola keuangan pemerintahan yang bersih bagi pembangunan berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Mardiasmo (2018); Halim dan Kusufi (2014); Mohamad (2019); Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010); Shim dan Siegel (2008); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — IHPS terbitan terkini; Sujarweni (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Dokumen kebijakan final: 12-18 halaman A4 (tidak termasuk lampiran), memuat semua komponen yang telah direvisi pasca-peer-review Minggu 14, dilengkapi lampiran peta risiko (spreadsheet), matriks tindak lanjut, dan deklarasi penggunaan AI Generatif bila ada — dikumpulkan via LMS UNISAN paling lambat pada hari pelaksanaan sesi; materi presentasi PowerPoint maksimum 15 slide juga diunggah sebagai bagian paket pengumpulan	berbasis bukti; pleno penutup memfasilitasi integrasi pengetahuan lintas topik semester dan penghayatan nilai service serta nationalism melalui orientasi rekomendasi pada kepentingan publik KTI Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Finalisasi dan presentasikan dokumen kebijakan kelompok yang telah direvisi secara komprehensif berdasarkan umpan balik peer review Minggu 14. Dokumen final wajib menunjukkan kohesi antara tiga komponen: rancangan mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, strategi penguatan SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut berbasis bukti — semuanya dikontekstualisasikan pada pemerintah daerah sampel di Kawasan Timur			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia. Dokumen harus mencerminkan integrasi analitik seluruh materi semester: dari kerangka regulasi keuangan daerah, mekanisme penatausahaan APBD, pengendalian intern, hingga evaluasi pengawasan berbasis data BPK. Setiap komponen rekomendasi wajib didukung rujukan regulasi dan data empiris yang jelas. Sertakan bagian refleksi singkat (maksimum 300 kata) tentang keterbatasan rekomendasi dan arah pengembangan lanjutan. Deklarasikan penggunaan AI Generatif secara eksplisit bila digunakan dalam penyusunan dokumen. Deliverable: Dokumen kebijakan final dalam format Word, 12-18 halaman A4 (tidak termasuk lampiran), memuat: halaman judul, pernyataan orisinalitas dan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				deklarasi AI, ringkasan eksekutif (maksimum 300 kata), pendahuluan berbasis temuan evaluasi, tiga komponen rancangan kebijakan, refleksi keterbatasan, daftar pustaka, dan lampiran wajib (peta risiko dalam format spreadsheet, matriks rencana tindak lanjut empat kolom, serta bukti revisi pasca-peer-review berupa highlight perubahan atau catatan respons) — diunggah ke LMS UNISAN pada hari sesi; file PowerPoint maksimum 15 slide juga diunggah sebagai paket pengumpulan final			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester : Cakupan: Sub-CPMK4–Sub-CPMK6						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Dokumen	10	
2	Kuis	10	
3	UTS	20	
4	UAS	20	
5	Proyek Kebijakan	40	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Dokumen	Kuis	UTS	UAS	Proyek Kebijakan	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	4	4	—	—	8
Sub-CPMK2	—	3	4	—	—	7
Sub-CPMK3	5	—	4	—	—	9
Sub-CPMK4	5	—	4	10	—	19
Sub-CPMK5	—	3	—	10	20	33
Sub-CPMK6	—	—	4	—	20	24
Bobot Komponen (%)	10	10	20	20	40	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Audit Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia — Analisis, Evaluasi, dan Rancangan Kebijakan Perbaikan

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan				
KODE	3PBIP322	sks	3	SEMESTER	5
DOSEN PENGAMPU	Hasan Bau, S.E., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) berbasis Studi Kasus Dokumen Resmi					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Audit Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia — Analisis, Evaluasi, dan Rancangan Kebijakan Perbaikan					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK2: Membedakan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah — mencakup struktur APBN/APBD, proses penyusunan KUA-PPAS, dan prinsip money follows program — serta menerapkan identifikasi pos anggaran pada dokumen anggaran nyata.					
Sub-CPMK3: Menganalisis permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan minimal 2 kasus temuan BPK atau penyimpangan anggaran yang terdokumentasi, dengan kerangka analisis kebijakan fiskal.					
Sub-CPMK4: Menganalisis pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah — mencakup mekanisme SP2D, pembukuan berbasis SAP (PP 71/2010), dan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, CaLK) — melalui telaah dokumen laporan keuangan daerah.					
Sub-CPMK5: Mengevaluasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah — mencakup peran APIP, SPIP, dan mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK — serta menilai keterkaitan antara					

kualitas pengawasan dengan opini audit (WTP/WDP) pada pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia. Sub-CPMK6: Merancang rekomendasi perbaikan sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang mencakup: rancangan mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut berbasis bukti — yang disajikan dalam dokumen kebijakan tertulis dan dipresentasikan secara kritis.
DISKRIPSI TUGAS Mahasiswa secara berkelompok memilih satu pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di Kawasan Timur Indonesia, kemudian melakukan telaah mendalam terhadap dokumen anggaran (APBD/KUA-PPAS), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), laporan hasil pemeriksaan BPK, dan dokumen SAKIP/LAKIP. Berdasarkan telaah tersebut, mahasiswa menganalisis permasalahan akuntabilitas dan transparansi, mengevaluasi sistem pengawasan internal (SPIP/APIP), serta merancang dokumen kebijakan perbaikan tata kelola keuangan yang aplikatif, berbasis bukti, dan relevan dengan konteks fiskal daerah KTI. Proyek ini menuntut integritas akademik dalam penggunaan data publik, kreativitas dalam perumusan rekomendasi, serta jiwa pelayanan publik (service) yang berorientasi pada penguatan akuntabilitas daerah.
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus) Telaah dokumen APBD/KUA-PPAS: identifikasi struktur anggaran, kesesuaian prinsip money follows program, dan konsistensi perencanaan-penganggaran. Analisis siklus keuangan daerah: pemetaan tahapan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban mengacu pada UU 17/2003, UU 1/2004, dan PP 71/2010. Analisis akuntabilitas dan transparansi: telaah minimal 2 temuan BPK atau kasus penyimpangan anggaran terdokumentasi pada pemerintah daerah yang dipilih, menggunakan kerangka analisis kebijakan fiskal. Telaah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD): analisis komponen LRA, Neraca, LO, dan CaLK serta kesesuaiannya dengan SAP berbasis akrual (PP 71/2010). Evaluasi sistem pengawasan internal: penilaian peran APIP, implementasi SPIP, tindak lanjut rekomendasi BPK, dan korelasinya dengan opini audit (WTP/WDP). Rancangan dokumen kebijakan perbaikan: mencakup mekanisme pengawasan berbasis risiko, strategi penguatan SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut berbasis bukti. Presentasi kritis: pemaparan temuan dan rekomendasi dalam forum seminar kelas dengan tanya-jawab terstruktur.
LANGKAH Pengerjaan Tugas Tahap 1 — Orientasi & Pembentukan Kelompok (Mg 1–2): Dosen memaparkan kerangka proyek; mahasiswa membentuk kelompok (4–5 orang), memilih pemerintah daerah KTI sebagai objek kajian, dan menyerahkan lembar persetujuan topik beserta justifikasi pemilihan daerah. Tahap 2 — Pemetaan Regulasi & Siklus Keuangan (Mg 3–4): Kelompok menyusun matriks regulasi (UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010, dan turunannya) dan memetakan tahapan siklus keuangan daerah objek kajian; luaran berupa ringkasan kerangka regulasi 2–3 halaman. Tahap 3 — Telaah Dokumen Anggaran (Mg 5–6): Kelompok mengunduh dan menganalisis dokumen APBD dan KUA-PPAS daerah yang dipilih; mengidentifikasi struktur pos anggaran, kesesuaian prinsip money follows program, serta inkonsistensi perencanaan-penganggaran; luaran berupa tabel analisis anggaran terstruktur. Tahap 4 — Analisis Akuntabilitas & Temuan BPK (Mg 7–8): Kelompok mengidentifikasi dan menganalisis minimal 2 temuan BPK atau kasus penyimpangan anggaran terdokumentasi menggunakan kerangka analisis kebijakan fiskal; luaran berupa laporan analisis kasus (UTS checkpoint — dikumpulkan di akhir Mg 8). Tahap 5 — Telaah Laporan Keuangan Daerah (Mg 9–10): Kelompok menelaah komponen LKPD (LRA, Neraca, LO, CaLK) daerah yang dipilih; mengidentifikasi kesesuaian dengan SAP berbasis akrual dan mencermati mekanisme SP2D serta pembukuan; luaran berupa lembar telaah LKPD berannotasi. Tahap 6 — Evaluasi Pengawasan Internal (Mg 11–12): Kelompok mengevaluasi peran APIP, implementasi SPIP, dan tindak lanjut rekomendasi BPK; menilai korelasi antara kualitas pengawasan dengan opini audit yang diterima daerah; luaran berupa matriks evaluasi pengawasan dan opini audit. Tahap 7 — Penyusunan Dokumen Kebijakan Perbaikan (Mg 13–14): Kelompok merancang dokumen kebijakan yang memuat: (a) mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, (b) strategi penguatan pelaporan SAKIP/LAKIP, dan (c) rencana tindak lanjut berbasis bukti; dokumen disusun dalam format policy brief 10–15 halaman. Tahap 8 — Seminar Presentasi & Tanya-Jawab Kritis (Mg 15): Setiap kelompok mempresentasikan seluruh hasil proyek (15 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab); kelompok lain berperan sebagai pembahas kritis; seluruh dokumen final dikumpulkan pada akhir sesi.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Lembar persetujuan topik (Mg 2); 2) Matriks regulasi & peta siklus keuangan (Mg 4); 3) Tabel analisis dokumen APBD/KUA-PPAS (Mg 6); 4) Laporan analisis kasus BPK/penyimpangan anggaran — UTS Checkpoint (Mg 8); 5) Lembar telaah LKPD beranotasi (Mg 10); 6) Matriks evaluasi pengawasan internal dan opini audit (Mg 12); 7) Dokumen kebijakan perbaikan tata kelola keuangan — policy brief 10–15 halaman (Mg 14); 8) Slide presentasi (maks. 20 slide) + rekaman seminar/video presentasi (Mg 15); 9) Log kontribusi individu yang ditandatangani seluruh anggota kelompok.	
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN	
a. Ketepatan pemetaan regulasi dan siklus keuangan daerah (bobot 10%). Matriks regulasi memuat seluruh regulasi utama (UU 17/2003, UU 1/2004, PP 71/2010) dengan pemetaan tahapan siklus keuangan yang berurutan, akurat, dan dikaitkan secara eksplisit pada daerah objek kajian. b. Kedalaman analisis dokumen APBD/KUA-PPAS (bobot 15%). Analisis mengidentifikasi struktur pos anggaran secara spesifik, menunjukkan bukti kesesuaian atau ketidaksesuaian prinsip money follows program, dan didukung data angka riil dari dokumen resmi daerah. c. Kualitas analisis akuntabilitas dan temuan BPK (bobot 20%). Analisis membahas minimal 2 temuan BPK atau kasus penyimpangan terdokumentasi menggunakan kerangka kebijakan fiskal yang tepat, menyertakan akar masalah, dampak, dan keterkaitan antar-temuan secara kritis. d. Ketajaman telaah laporan keuangan daerah (LKPD) (bobot 15%). Telaah mencakup seluruh komponen LKPD (LRA, Neraca, LO, CaLK) dengan anotasi yang menunjukkan kesesuaian atau deviasi terhadap SAP berbasis akrual PP 71/2010 dan mengaitkannya dengan mekanisme SP2D. e. Kualitas evaluasi sistem pengawasan internal (bobot 15%). Evaluasi menilai peran APIP, implementasi SPIP, dan tindak lanjut rekomendasi BPK secara sistematis, disertai penilaian berbasis bukti atas korelasi antara kualitas pengawasan dan opini audit yang diterima daerah. f. Kelayakan dan originalitas rancangan dokumen kebijakan perbaikan (bobot 15%). Policy brief memuat rancangan mekanisme pengawasan berbasis risiko, strategi SAKIP/LAKIP, dan rencana tindak lanjut yang spesifik, aplikatif pada konteks daerah KTI, berbasis bukti dari temuan proyek, serta menunjukkan kreativitas solusi yang tidak generik. g. Kualitas presentasi kritis dan kemampuan argumentasi (bobot 10%). Presentasi menyajikan temuan secara terstruktur, lugas, dan dalam durasi yang tepat; mahasiswa mampu berargumentasi secara kritis dan menjawab pertanyaan pembahas dengan mengacu pada data dan regulasi.	
JADWAL PELAKSANAAN	
Mg 1–2: Orientasi proyek, pembentukan kelompok, pemilihan daerah KTI, pengumpulan lembar persetujuan topik. Mg 3–4: Penyusunan matriks regulasi dan peta siklus keuangan daerah (luaran: ringkasan kerangka regulasi). Mg 5–6: Telaah dan analisis dokumen APBD/KUA-PPAS (luaran: tabel analisis anggaran). Mg 7–8: Analisis akuntabilitas dan temuan BPK/penyimpangan anggaran — UTS Checkpoint: pengumpulan laporan analisis kasus. Mg 9–10: Telaah LKPD (LRA, Neraca, LO, CaLK) dan mekanisme SP2D (luaran: lembar telaah beranotasi). Mg 11–12: Evaluasi sistem pengawasan internal — APIP, SPIP, tindak lanjut BPK, opini audit (luaran: matriks evaluasi). Mg 13–14: Penyusunan dan finalisasi dokumen kebijakan perbaikan — policy brief 10–15 halaman. Mg 15: Seminar presentasi kritis kelompok (15 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab); pengumpulan seluruh dokumen final.	
LAIN-LAIN	
Proyek dikerjakan secara berkelompok (4–5 mahasiswa per kelompok) dengan objek kajian unik per kelompok (tidak boleh memilih daerah yang sama); kontribusi individu dibuktikan melalui log kontribusi bertanda tangan yang diserahkan bersama dokumen final, dan dosen berhak memanggil anggota kelompok secara individual untuk verifikasi pemahaman — nilai individu dapat diturunkan hingga 30% apabila kontribusi tidak proporsional; seluruh data yang digunakan wajib bersumber dari dokumen resmi dan publik (BPK, Kemenkeu, portal daerah) sebagai wujud nilai integritas (Integrity); pengumpulan dokumen antara (Mg 4, 6, 8, 10, 12) bersifat wajib sebagai bukti progres dan dievaluasi secara formatif; keterlambatan pengumpulan dokumen final (Mg 14–15) dikenakan pengurangan nilai 5% per hari kerja, dengan toleransi maksimal 3 hari kerja setelah batas waktu — lewat dari itu dokumen tidak diterima; plagiarisme dan fabrikasi data dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan UNISAN yang berlaku.	
DAFTAR RUJUKAN	

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (berbagai tahun). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [dokumen publik, diakses melalui www.bpk.go.id].

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Salemba Empat.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Andi.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.

5.1 Tugas Analisis Dokumen

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Dokumen			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

5.2 Kuis

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami
6	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
7	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
8	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
9	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
10	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa			NIM		
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

5.5 Proyek Kebijakan (Holistik)

Nama Mahasiswa			NIM		
Judul Tugas		Proyek Kebijakan			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.